

POINT  
PDUS

ERMA & LSP MKS  
Certification Holder

PELATIHAN BERSERTIFIKASI



Certified  
Governance  
Professional

# Governance Fundamentals

Fundamental Tata Kelola

Diselenggarakan oleh :



**CRMS**

Center for  
Risk Management  
& Sustainability



Bekerja sama dengan:



**LSP MKS**  
Manajemen Risiko berbasis SNI ISO 31000



# Sinopsis

Tata kelola merupakan salah satu tantangan bagi organisasi. Kegagalan tata kelola organisasi ditunjukkan oleh bermunculannya berbagai kasus atau insiden besar yang merugikan dan dugaan penyalahgunaan wewenang di organisasi, baik di sektor publik maupun privat. Dengan demikian, tata kelola yang baik semakin penting bagi organisasi.

## Tata kelola organisasi membantu untuk:

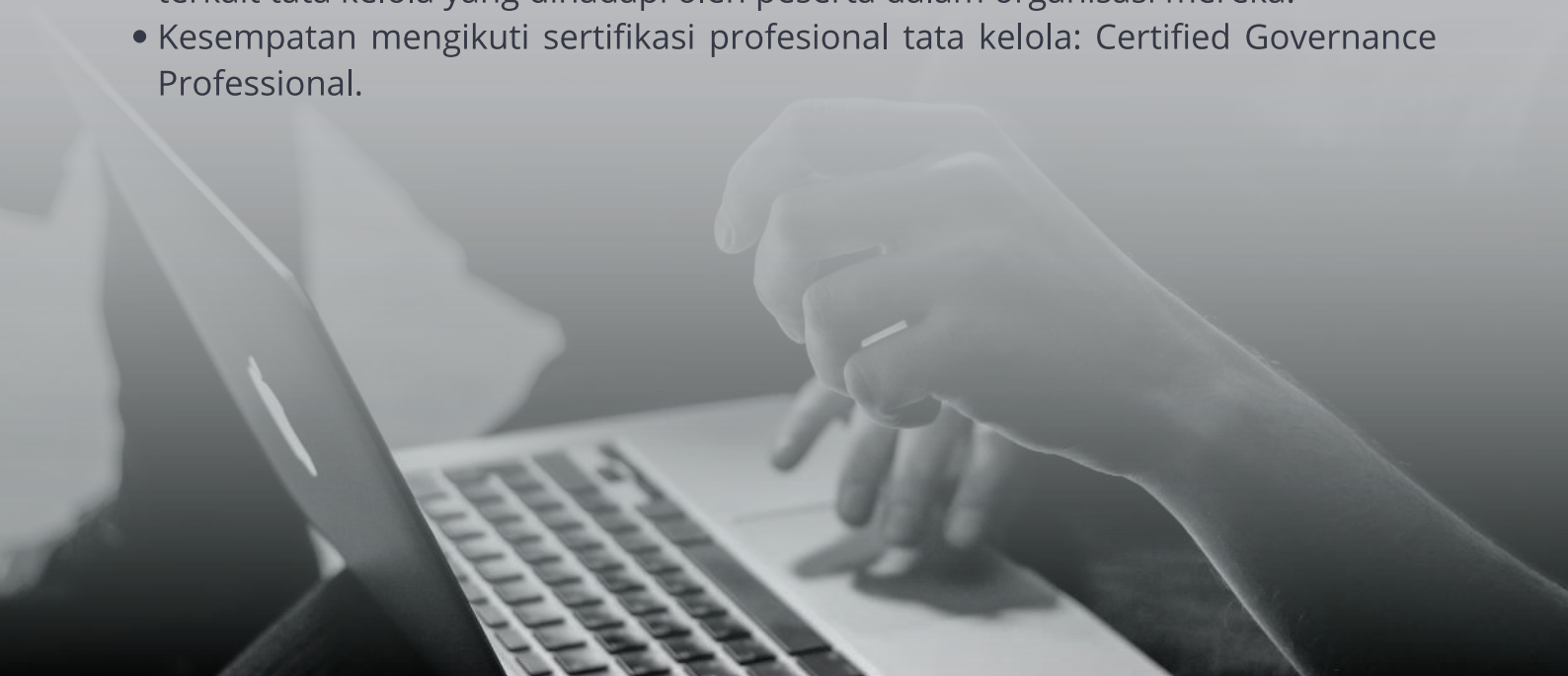
- Mencerminkan identitas, misi atau tujuan organisasi sehubungan dengan masyarakat dan pemangku kepentingannya.
- Meningkatkan efektivitas, keberlanjutan, akuntabilitas dan keadilan organisasi.
- Memenuhi tujuan organisasi.
- Menghindari insiden besar.

Pelatihan ini mencakup prinsip kunci, praktik relevan, dan kerangka kerja untuk tata kelola organisasi yang baik agar organisasi dapat memenuhi tanggung jawab dan mencapai tujuannya.



# Manfaat

- Pemahaman mengenai pentingnya tata Kelola bagi pertumbuhan dan keberlangsungan organisasi.
- Pemahaman fundamental mengenai tata kelola dan bagaimana menerapkan tata kelola yang efektif serta mengukur penerapan tata kelola dalam organisasi
- Pengalaman praktis melalui studi kasus yang relevan bagi organisasi Indonesia
- Kesempatan berdiskusi dengan para narasumber untuk membahas topik dan isu terkait tata kelola yang dihadapi oleh peserta dalam organisasi mereka.
- Kesempatan mengikuti sertifikasi profesional tata kelola: Certified Governance Professional.





Certified  
Governance  
Professional

## Certified Governance Professional (CGP)

Peserta pelatihan yang memenuhi persyaratan\* berkesempatan untuk mengikuti ujian sertifikasi Certified Governance Professional (CGP), yang dapat merekognisi kompetensinya di bidang pelaksanaan tata kelola korporasi atau tata kelola publik, serta manajemen risiko berbasis tata kelola.

Sertifikasi ini dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Mitra Kalyana Sejahtera (LSP MKS), yang telah memperoleh lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dengan Nomor: BNSP-LSP-628-ID serta telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Nomor: LSP-015-IDN.

Skema sertifikasi CGP ini dibangun berdasarkan Standar Kompetensi Kerja (SKK) khusus pelaksana tata kelola yang merujuk pada pedoman umum Good Corporate Governance (GCG) serta Good Public Governance (GPG) yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

\*Syarat & Ketentuan berlaku



## Peserta

- Direktur yang membawahi manajemen risiko, kepatuhan, dan/atau tata kelola
- Komisaris yang menjadi pimpinan komite audit dan/atau komite pemantau risiko
- Anggota komite audit dan anggota komite pemantau risiko
- Corporate Secretary
- Pimpinan dari fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan/atau tata kelola dari perusahaan
- Konsultan/akademisi di bidang manajemen risiko, kepatuhan dan/atau tata kelola
- Para praktisi dan professional di bidang manajemen risiko, kepatuhan, dan/atau tata Kelola

## Registrasi

[Klik Disini](#)

Atau Pindai:



Informasi lebih lanjut:  
Email: [secretariat@crmsindonesia.org](mailto:secretariat@crmsindonesia.org)  
Phone/Whatsapp: +62811 22 333 075

# Host

Program ini akan didampingi serta difasilitasi oleh host atau fasilitator ahli dari CRMS. Selain itu juga dapat mengundang pembicara tamu untuk berbagi pengalaman praktis dengan para peserta.



## Viktor Riwu Kaho

Victor Riwu Kaho adalah seorang konsultan ahli di bidang tata kelola korporasi dan manajemen perusahaan. Saat ini beliau menjabat sebagai senior trainer dan technical advisor di Center for Risk Management & Sustainability (CRMS); Sekretaris Jenderal Asosiasi GRC; Managing Partner di PT Wisma Inti Management (WIM) Consult; dan Komisaris Independen di PT Jamkrida NTT.

Beliau menangani proyek GCG sejak tahun 2002 baik di sejumlah BUMN seperti di antaranya Pelindo 1, Pelindo 2, PGN, RNI, Jasa Marga, dan lain-lain; dan juga perusahaan non-BUMN, seperti di antaranya Bakrie Telecom, Indo Tambangraya Megah, dan lain-lain. Beliau juga telah membantu penerapan manajemen risiko berbasis ISO 31000 di berbagai perusahaan besar seperti Jasa Marga, Marga Sarana Jabarm United Tractoos, Jasa Raharja Putera, RNI, ASEI, Perkebunan Nusantara III, Lembaga Penjamin Simpanan, dan lain-lain.



## Mas Achmad Daniri

Dr. Mas Achmad Daniri memiliki perjalanan karir yang unggul dalam implementasi Good Corporate Governance. Beliau berpengalaman sebagai: eksekutif di Bursa Efek Indonesia dan di sebuah perusahaan multinasional; arbiter Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance, Wakil Ketua Komite Kebijakan Publik Kementerian BUMN, pendiri dan Chartered Member Lembaga Komisaris dan Direktur

Indonesia, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Corporate Governance dan Etika Bisnis, Ketua Komite Bayangan ISO 26000 (Social Responsibility) untuk Indonesia, Anggota Panitia Seleksi Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Anggota Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional, anggota Tim Pewawancara Uji Kemampuan dan Kepatutan untuk Calon Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris, dan Direktur Bank Umum, serta anggota Komite Etik Level Governance Otoritas Jasa Keuangan.



## Dr. Waluyo

Pakar bidang sektor publik dengan pengalaman sebagai Komisiner Aparatur Sipil Negara (ASN), yang membangun komisi baru untuk mengawal pelaksanaan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara. Beliau pernah menjabat sebagai wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang ikut membangun kesisteman di awal terbentuknya organisasi KPK dan melakukan program transformasi selama di Pertamina.

Beliau juga adalah Anggota Komisi Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 03-10 Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan di Badan Standardisasi Nasional (BSN); anggota ISO/TC 309 Governance of Organizations; Wakil Ketua Bidang Governance Publik dalam Komisi Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Beliau berpengalaman lebih dari 30 tahun di organisasi modern, baik di perusahaan dunia maupun di BUMN.